

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kepahiang

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1948, Kepahiang tetap menja di ibukota Kabupaten Rejang Lebong dan menjadi ibukota perjuangan karena mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BTRI dan TKR sebagai cikal bakal TNI juga berpusat di Kepahiang. Pada tahun 1948 terjadi aksi Militer Belanda ke II, maka untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Belanda ke pusat pemerintah dan pusat perlawanan ini, seluruh fasilitas yang ada terdiri dari ; Kantor Bupati, Gedung Daerah, Kantor Polisi, Kantor Pos dan Telepon, penjara serta jembatan yang akan menghubungkan Kota Kepahiang dengan tempat lainnya semua dibumihanguskan.⁸²

Tahun 1949 Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan dan waktu penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda ke Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah kembali ke Kota, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak

⁸² <https://kepahiangkab.go.id/sejarah-daerah/>, diakses pada 01 Februari 2025

dapat kembali ke Kota Kepahiang karena seluruh fasilitas telah dibumihanguskan maka seluruh staf Pemerintah menumpang di Kota Curup yang masih ada bangunan Pesanggrahan di tempat Gedung Olahraga Curup sekarang. Tahun 1956, Curup ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang dan sejak itu pula Kepahiang menjadi ibukota Kecamatan sehingga hilanglah Mahkota Kabupaten dari Kota Kepahiang.

Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Sebagai tindaklanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka

secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.⁸³

Merebut kembali Mahkota Kepahiang ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan demikian kata pepatah, walaupun untuk Propinsi Bengkulu, Kepahiang merupakan daerah yang pertama memperjuangkan pemekaran tetapi terakhir mendapat pengesahan karena Kabupaten Induk (Rejang Lebong) tidak mau melepas Kepahiang ini karena Kepahiang merupakan daerah yang paling potensial di Rejang Lebong. Kepala Daerah Pertama untuk Kabupaten Kepahiang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor : 131.28-8 Tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepahiang Propinsi Bengkulu, dan telah dilantik oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Januari 2004, Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU.

Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota Propinsi dan Kota Administratif (Kotif) tapi tidak berhasil. Dengan

⁸³ <https://kepahiangkab.go.id/sejarah-daerah/>, diakses pada 01 Februari 2025

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi Kabupaten kembali. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten kembali sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh masyarakat Kepahiang, maka dibentuk Badan Perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Sebagai tindaklanjut dari Badan Perjuangan tersebut maka secara resmi Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK) telah menyampaikan proposal pemekaran Kabupaten Kepahiang kepada ; Bupati Kepala Daerah Rejang Lebong, DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Gubernur Bengkulu, DPRD Propinsi Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.⁸⁴

Kota Kepahiang sejak zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong yang pada waktu itu disebut afdeling Rejang Lebong dengan ibu kotanya Kepahiang. Pada zaman pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun, Kepahiang tetap merupakan

⁸⁴ <https://kepahiangkab.go.id/sejarah-daerah/>, diakses pada 01 Februari 2025

pusat pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Akhirnya dengan kesungguhan dan keikhlasan para pejuang Kabupaten Kepahiang, maka Mahkota Kepahiang yang hilang dapat direbut kembali bagai pinang pulang ketampuknya pada tanggal 7 Januari 2004 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu.

B. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Kepahiang

Visi DPRD Kepahiang: Mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan dengan dasar aspirasi masyarakat yang berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang tepat dan sinergi dengan pemerintah daerah.⁸⁵

Misi DPRD Kepahiang:

- 1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 2 Mengoptimalkan peran legislatif dalam pembuatan peraturan daerah yang pro-rakyat.
- 3 Mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

⁸⁵ <https://dprdkepahiang.com/visi-misi-2/>, diakses pada 01 Februari 2025

- 4 Meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pembangunan dan anggaran daerah.
- 5 Menjalin kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

C. Profil DPRD Kabupaten Kepahiang

Profil anggota DPRD Kepahiang menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam pembangunan daerah. Dengan latar belakang yang beragam dan komitmen untuk melayani masyarakat, mereka berupaya untuk menjawab tantangan yang ada. Keterlibatan mereka dalam berbagai program dan kegiatan masyarakat menjadi bukti nyata bahwa mereka berusaha untuk mewujudkan aspirasi rakyat dan membangun Kepahiang menjadi lebih baik.⁸⁶

1. Profil Anggota DPRD Kepahiang

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang memiliki peran yang vital dalam mewakili suara masyarakat serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Mereka adalah individu yang terpilih melalui proses demokrasi dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan

⁸⁶

<https://dprdkepahiang.com/2025/01/profil-anggota-dprd-kepahiang/#:~:text=Profil%20Anggota%20DPRD%20Kepahiang.%20Anggota%20Dewan%20Perwakilan,yang%20terpilih%20melalui%20proses%20demokrasi%20dan%20memiliki>, diakses pada 01 Februari 2025

aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan daerah.

2. Komposisi Anggota DPRD Kepahiang

DPRD Kepahiang terdiri dari berbagai latar belakang dan partai politik. Setiap anggota membawa perspektif unik berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka. Misalnya, ada anggota yang berasal dari latar belakang pendidikan, kesehatan, hingga pengusaha. Keberagaman ini membantu dalam menciptakan kebijakan yang lebih komprehensif yang dapat menjawab berbagai isu yang ada di masyarakat.

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas utama anggota DPRD adalah merumuskan peraturan daerah serta mengawasi pelaksanaan anggaran. Mereka juga terlibat dalam dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan isu-isu yang dihadapi. Sebagai contoh, seorang anggota DPRD mungkin mengadakan pertemuan dengan warga desa untuk membahas masalah infrastruktur seperti jalan rusak, sehingga mereka dapat mengusulkan perbaikan anggaran dalam rapat DPRD.

4. Peran dalam Masyarakat

Anggota DPRD bukan hanya sekadar pengambil keputusan, tetapi juga menjadi jembatan antara

pemerintah dan masyarakat. Mereka seringkali mengadakan kegiatan sosialisasi untuk menjelaskan program-program pemerintah kepada publik. Dalam salah satu program, anggota DPRD dapat mengadakan seminar tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua akan pendidikan.

5. Tantangan yang Dihadapi

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah mempertahankan integritas di tengah tekanan politik dan kepentingan pribadi. Mereka harus mampu menyeimbangkan kepentingan partai, masyarakat, dan pemerintah. Misalnya, dalam situasi di mana ada proyek pembangunan yang mendapat protes dari masyarakat, anggota DPRD harus mendengarkan keluhan warga sekaligus mempertimbangkan keuntungan dari proyek tersebut bagi daerah.

D. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Kepahiang

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran dan Pengawasan.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:⁸⁷

1. Membentuk Perda bersama Bupati.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai APBD yang diajukan Bupati.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentiannya.
5. Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

87

<https://dprdkepahiang.com/2025/01/profil-anggota-dprd-kepahiang/#:~:text=Profil%20Anggota%20DPRD%20Kepahiang.%20Anggota%20Dewan%20Perwakilan,yang%20terpilih%20melalui%20proses%20demokrasi%20dan%20memiliki>, diakses pada 01 Februari 2025

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat sedangkan anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Raperda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, hak protokoler, keuangan dan administratif serta mempunyai ruang kerja. Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi dan mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan kepada pejabat pemerintah.

E. Tugas dan Fungsi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Kepahiang

1. Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang

Komisi I DPRD Kepahiang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui tugas dan fungsinya, mereka berusaha untuk

memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan tantangan yang ada, keberadaan komisi ini tetap menjadi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan suara dan aspirasi mereka diperhatikan dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah.⁸⁸

- a. Pengenalan Komisi I DPRD Kepahiang, Komisi I DPRD Kepahiang merupakan salah satu lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah. Sebagai bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi I bertugas untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait aspek politik, hukum, dan pemerintahan. Melalui berbagai program dan kegiatan, komisi ini berupaya menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
- b. Tugas dan Fungsi Komisi I, Komisi I memiliki beberapa tugas yang sangat relevan dengan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah mengevaluasi peraturan daerah yang berkaitan dengan pemerintahan dan administrasi. Misalnya, ketika ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh

⁸⁸ <https://dprdkepahiang.com/2025/01/komisi-i-dprd-kepahiang/>, diakses 01 Februari 2025

pemerintah daerah, Komisi I akan melakukan analisis dan memberikan masukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, komisi ini juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang sudah ada. Dalam konteks ini, mereka sering melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung implementasi kebijakan di masyarakat. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dicanangkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat.

c. Peran Komisi I dalam Mewakili Aspirasi Masyarakat, Salah satu fungsi utama dari Komisi I adalah sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, anggota komisi sering kali mengadakan pertemuan dengan komunitas, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lain untuk mendengarkan masukan dan keluhan mereka. Misalnya, jika ada masalah terkait pelayanan publik di suatu desa, anggota Komisi I akan mengumpulkan informasi dan membawa isu tersebut ke sidang dewan untuk dibahas lebih lanjut. Melalui dialog dengan masyarakat, Komisi I

dapat mengidentifikasi isu-isu yang mendesak dan kemudian merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah. Ini menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

- d. Contoh Kegiatan Komisi I, Dalam menjalankan tugasnya, Komisi I sering melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan dan kebijakan yang ada. Misalnya, saat ada perubahan undang-undang yang mempengaruhi hak-hak masyarakat, Komisi I akan mengadakan seminar atau lokakarya untuk menjelaskan hal ini secara rinci, Selain itu, Komisi I juga terlibat dalam berbagai acara yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Mereka sering berkolaborasi dengan instansi terkait dalam merencanakan program-program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, diharapkan hasil pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi semua pihak.

e. Tantangan yang Dihadapi Komisi I, Meskipun memiliki tugas yang penting, Komisi I juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya. Seringkali, mereka harus bekerja dengan anggaran yang terbatas, yang dapat mempengaruhi efektivitas program yang ingin dilaksanakan. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, Komisi I perlu melakukan inovasi dalam metode komunikasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik. Dengan mendekati diri kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, diharapkan akan terjadi peningkatan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.

2. Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang

Komisi II DPRD Kepahiang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memfasilitasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja keras dan dedikasi, mereka terus berupaya untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Keterlibatan

aktif dari masyarakat dan dukungan dari semua pihak sangat penting agar visi pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud. Komisi II akan terus berkomitmen untuk menjawab tantangan dan mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat Kepahiang.⁸⁹

b. Pengenalan Komisi II DPRD Kepahiang, Komisi II DPRD Kepahiang merupakan salah satu dari beberapa komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi ini memiliki peran penting dalam mengawasi dan membahas berbagai isu yang berkaitan dengan ekonomi, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat di daerah Kepahiang. Dengan anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, Komisi II berupaya untuk menciptakan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

c. Tugas dan Fungsi Komisi II, Tugas utama Komisi II adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah daerah yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan pembangunan. Misalnya, ketika ada proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan atau

⁸⁹ <https://dprdkepahiang.com/2025/01/komisi-ii-dprd-kepahiang/>, diakses 01 Februari 2025

- jembatan, Komisi II bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
- d. Pencapaian dan Tantangan, Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi II telah berhasil mencapai berbagai hal positif. Salah satu contohnya adalah peningkatan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat kota. Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan anggaran dan birokrasi yang terkadang menghambat pelaksanaan program.
- e. Keterlibatan Masyarakat, Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan salah satu fokus utama Komisi II. Melalui forum-forum dialog dan sosialisasi, mereka berusaha mendengar langsung pendapat dan harapan masyarakat. Misalnya, ketika merencanakan program pembangunan, Komisi II sering mengadakan

pertemuan di desa-desa untuk menggali informasi tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga. Hal ini diharapkan dapat menciptakan program yang lebih tepat sasaran.

- f. Peran Komisi II dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan, Komisi II juga memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap proyek yang mereka awasi, mereka berusaha untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merusak sumber daya alam. Contohnya, dalam proyek pengembangan pertanian, mereka mendorong penggunaan metode pertanian yang ramah lingkungan agar hasil pertanian dapat berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem.

3. Komisi III DPRD Kabupaten Kepahiang

Komisi III DPRD Kepahiang memiliki tanggung jawab yang luas dalam pengawasan dan pengembangan infrastruktur serta kebijakan lingkungan. Melalui interaksi aktif dengan masyarakat, pembahasan anggaran yang cermat, dan pengawasan yang ketat, komisi ini berusaha untuk memastikan bahwa semua program dan proyek yang dijalankan

dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan peran yang strategis ini, Komisi III berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.⁹⁰

- a. Peran dan Tanggung Jawab Komisi III DPRD Kepahiang, Komisi III DPRD Kepahiang memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan pengembangan berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, komisi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, dalam proyek pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil, Komisi III berperan aktif melakukan pemantauan agar proyek tersebut tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berkualitas.
- b. Interaksi dengan Masyarakat, Salah satu tugas utama Komisi III adalah menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Melalui forum-forum terbuka, mereka mendengarkan keluhan dan masukan dari warga terkait kondisi infrastruktur

⁹⁰ <https://dprdkepahiang.com/2025/01/komisi-iii-dprd-kepahiang/>, diakses 01 Februari 2025

yang ada. Contoh nyata dari interaksi ini adalah ketika Komisi III mengadakan pertemuan di salah satu desa untuk mendengar langsung tentang masalah akses jalan yang rusak. Melalui dialog tersebut, mereka bisa mengambil langkah konkret, seperti merekomendasikan perbaikan kepada pemerintah daerah.

c. Pembahasan Rancangan Anggaran, Komisi III juga terlibat dalam pembahasan rancangan anggaran daerah. Mereka mengevaluasi alokasi dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang dianggap prioritas. Misalnya, jika terdapat usulan pembangunan jembatan baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Komisi III akan mempelajari kelayakan proyek tersebut dan berupaya memasukkannya ke dalam anggaran tahunan. Proses ini melibatkan analisis mendalam dan diskusi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien.

d. Pengawasan Proyek Pembangunan, Setelah anggaran disetujui, tugas Komisi III belum berakhir. Mereka tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam salah satu kasus, saat terjadi keterlambatan dalam

pembangunan fasilitas umum, Komisi III turun tangan untuk mencari tahu penyebabnya. Dengan melakukan kunjungan lapangan dan berkomunikasi dengan kontraktor, mereka dapat memberikan solusi dan mendorong percepatan pekerjaan agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.

- e. Peran dalam Kebijakan Lingkungan, Selain infrastruktur, Komisi III juga memiliki tanggung jawab dalam kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Mereka mengawasi proyek-proyek yang berpotensi berdampak buruk terhadap lingkungan. Sebagai contoh, ketika ada rencana pembangunan pabrik di kawasan yang dekat dengan sungai, Komisi III berperan untuk memastikan bahwa studi dampak lingkungan dilakukan dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

4. Komisi IV DPRD Kabupaten Kepahiang

Secara keseluruhan, Komisi IV DPRD Kepahiang memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup. Melalui pengawasan, rekomendasi, dan interaksi dengan

masyarakat, mereka berusaha untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya bermanfaat bagi sektor-sektor tersebut, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan keberadaan Komisi IV, diharapkan berbagai program dan kebijakan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien demi kemajuan Kepahiang.⁹¹

a. Pengenalan Komisi IV DPRD Kepahiang, Komisi IV DPRD Kepahiang memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan dan pengaturan berbagai aspek yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif, komisi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Tugas utama Komisi IV meliputi bidang pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya alam.

b. Tugas dan Fungsi Komisi IV, Salah satu tugas utama Komisi IV adalah melakukan pengawasan terhadap program-program yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perikanan. Dalam konteks ini, mereka

⁹¹ <https://dprdkepahiang.com/2025/01/komisi-iv-dprd-kepahiang/>, diakses pada 01 Februari 2025

sering melakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung kondisi petani dan nelayan di daerah Kepahiang. Misalnya, saat melakukan pemantauan terhadap hasil panen padi, anggota komisi dapat memberikan masukan mengenai teknik pertanian yang lebih efisien atau bantuan yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian. Selain itu, Komisi IV juga berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kebijakan yang dapat mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut. Dalam beberapa kesempatan, mereka mengusulkan pelatihan bagi petani tentang cara bertani yang ramah lingkungan atau penggunaan teknologi baru yang dapat meningkatkan produksi dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

- c. Peran dalam Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup menjadi salah satu fokus perhatian Komisi IV. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam, komisi ini aktif dalam mengawasi proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan. Mereka sering berkolaborasi dengan dinas terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai

pentingnya menjaga ekosistem. Contohnya, dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup, Komisi IV menginisiasi acara penanaman pohon di kawasan yang rawan erosi. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghijaukan daerah, tetapi juga untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

- d. Interaksi dengan Masyarakat, Komisi IV juga menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Mereka sering mengadakan forum diskusi atau pertemuan dengan petani dan nelayan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan yang mereka hadapi. Dengan cara ini, Komisi IV dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. Misalnya, ketika mendapati bahwa nelayan mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pasar untuk hasil tangkapan mereka, Komisi IV berupaya memfasilitasi kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu dalam pemasaran. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi lokal.

5. Komisi V DPRD Kabupaten Kepahiang

Komisi V DPRD Kepahiang memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur dan perhubungan di daerah. Melalui pengawasan, kolaborasi, dan keterlibatan masyarakat, mereka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan tantangan yang ada, komisi ini terus berupaya untuk menjadi lembaga yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat demi kemajuan Kepahiang yang lebih baik.⁹²

- a. Pengenalan Komisi V DPRD Kepahiang, Komisi V DPRD Kepahiang adalah salah satu komisi yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait infrastruktur, perhubungan, dan pembangunan di daerah tersebut. Komisi ini berfungsi untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan di bidang tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
- b. Tugas dan Fungsi Komisi V, Tugas utama Komisi V meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya. Mereka juga

⁹² <https://dprdkepahiang.com/2025/01/komisi-v-dprd-kepahiang/>, diakses pada 01 Februari 2025

bertanggung jawab untuk meninjau dan mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek ini. Sebagai contoh, ketika ada proyek pembangunan jalan yang mengalami keterlambatan, komisi ini akan melakukan rapat untuk mencari solusi dan memastikan bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

c. Peran dalam Masyarakat, Peran Komisi V dalam masyarakat sangat signifikan, terutama dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan warga terkait infrastruktur. Misalnya, jika warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, Komisi V akan berusaha untuk menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan kunjungan ke lokasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi. Ini menunjukkan bahwa komisi ini bukan hanya sekadar lembaga pemerintahan, tetapi juga jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

d. Kolaborasi dengan Instansi Lain, Kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya juga menjadi salah satu fokus utama Komisi V. Mereka sering bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan untuk merancang dan melaksanakan program yang mendukung pembangunan infrastruktur. Misalnya, saat merencanakan pembangunan jembatan baru, Komisi V akan

melibatkan ahli dari berbagai bidang untuk memastikan bahwa jembatan tersebut aman dan memenuhi standar yang diperlukan.

- e. Pentingnya Keterlibatan Publik, Keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan sangat penting bagi Komisi V. Dengan mengadakan forum atau diskusi terbuka, komisi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Sebagai contoh, dalam perencanaan pembangunan jalan baru, masyarakat dapat memberikan masukan tentang rute yang paling dibutuhkan.
- f. Tantangan yang Dihadapi, Meskipun memiliki peran yang vital, Komisi V juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang sering kali menjadi penghalang dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal koordinasi antar instansi yang kadang tidak berjalan mulus. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama yang baik, Komisi V berusaha untuk mengatasi masalah ini demi kepentingan masyarakat.